

**STRATEGI INDONESIA UNTUK MENGURANGI SAMPAH PLASTIK DI
LAUT MELALUI KEANGGOTAAN KERJASAMA REGIONAL
COORDINATING BODY IN THE SEAS OF EAST ASIA (COBSEA)**

Oleh : Bhima Agung Segoro

bhmsegoro@gmail.com

Pembimbing: Drs. Idjang Tjarsono, M.Si.

Bibliografi: 30 Jurnal, 15 Buku, 2 Majalah, 35 Dokumen Resmi, 2 Skripsi,
40 Situs Web

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The fact that Indonesia is the country that contributing marine plastic debris is the second largest in the world were indeed unavoidable again. The problem of marine plastic debris a threat so real and very contradictory for Indonesia who want to realizing the realization of Indonesia's Vision as a World Maritime Axis Country. Referring to the increasing intensity of marine plastic debris which gets higher throughout the year and not balanced by treating good of plastic waste, several strategies to reducing marine plastic debris are very much needed by Indonesia today, one of them by joining and conducting regional cooperation with the Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA). This research uses the theory of Sustainable Development Goals and supported by the concept of Maritime Security. This study also uses descriptive qualitative research methods and uses the Nation State as a level analysis . Research data is obtained through literature review and all research data derived directly from government official websites and related regional environmental agencies. Based on the results from analyzing of the researchers, it can be concluded that the Indonesian government's strategy to reduce marine s by joining and conducting regional cooperation with the Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) is to create and execute the Regional Action Plan of Marine Litter (RAP-MALI) and dividing again the action plan into several systematic and directed strategies. This research proves that the Indonesian government has a strong commitment and is trying to reduce marine plastic debris in order to realize Indonesia as the World's Maritime Axis.

Keywords: Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA), Marine Plastic Debris, Strategy, World's Maritime Axis, Regional Cooperation.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lautan tidak terlepas dari isu dan permasalahan yang menghubungkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada satu daratan ke daratan lainnya baik mekanisme pengaturan lautnya bersifat nasional atau bahkan wilayahnya adalah milik negara lain. Beranjak dari itu, perlu adanya kegiatan kerjasama antar negara yang tujuannya untuk melancarkan kepentingan di dalam laut yang menjadi kebutuhan bersama pada suatu negara. Hal ini berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan wilayah laut di dunia.

Terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Indonesia ke 7 Indonesia, membuat Indonesia kembali bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perhatian akan keadaan di wilayah lautan lebih memiliki perhatian yang besar. *“Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”* merupakan visi Kemaritiman 2045 dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan di masa depan. Di tengah isu dan permasalahan sektor kelautan yang sangat kompleks dan dinamis, dengan kondisi global dan nasional yang penuh ketidakpastian, maka diperlukan perencanaan strategi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai situasi di masa depan.¹

Pada praktiknya di lapangan terdapat enam tantangan nasional di sektor kelautan yang menjadi kemungkinan besar akan dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang yang tentunya akan menghambat realisasi Indonesia sebagai poros maritime dunia, diantaranya:

1. Ketahanan pangan
2. Ketahanan energi
3. **Pencemaran laut**
4. Keanekaragaman hayati laut
5. Pengelolaan lingkungan

¹ Pusat Penelitian Oseanografi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2017. *“FORESIGHT Riset KELAUTAN INDONESIA 2020–2035”*, diakses pada 7 Oktober 2018.

pesisir yang berkelanjutan

6. Perubahan iklim

Masalah pencemaran laut telah menjadi permasalahan yang serius hingga beberapa era ke depan. Masalah ini tidak hanya merusak keseimbangan ekosistem laut dan ketersediaan stok pangan, tapi akan menjadi ancaman bagi sektor lain seperti industri pariwisata yang mengandalkan kesehatan ekosistem laut, dan permasalahan sektor kesehatan masyarakat yang ditimbulkan akibat pencemaran laut.

Fokus global saat sekarang ini sedang mengarahkan perhatian penuh kepada sampah plastik di laut yang dewasa ini semakin meningkat, bersamaan pula dengan bencana di ekosistem yang saat ini mulai kerap dirasakan oleh manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan manusia sangat erat ketergantungannya dengan benda yang terbuat dari plastik di dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai sifat plastik dimulai dari yang begitu tahan lama, *fleksibel*, kuat, dan murah² sehingga membuat pemakaian benda yang terbuat dari plastik telah melebihi batas umum pemakaiannya. Lebih kurang sekitar 8,3 miliar ton plastik telah diproduksi secara massal sejak tahun 1950. Saat ini laut diperkirakan sudah menampung 150 juta ton sampah plastik dengan 250 ribu tonnya terfragmentasi menjadi 5 triliun potongan plastic dan laut diprediksi akan menampung 250 juta ton sampah plastik pada tahun 2050.³ Sifat plastik yang persisten memungkinkan kandungan plastik yang berada lama di dalam tubuh makhluk hidup laut pindah ke

²Repository IPB. *Tinjauan Pustaka : Plastik*. <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/61830/2/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf> diakses pada 8 Oktober Pukul 20.41 WIB.

³ Gallo, F., Fossi, C., Weber, R., Santillo, D., Sousa, J., Ingram, I., Nadal, A., Romano, D. (2018). *“Marine Litter Plastics And Microplastics And Their Toxic Chemicals Component : The Need For Urgent Preventive Measures”*. Environmental Sciences Europe 30:13. DOI: 10.1186/s12302-018-0139-z.

manusia melalui skema rantai makanan dan sampah plastik di laut pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi secara global pada bidang perikanan, dan perkapalan hingga mencapai 1,2 miliar dolar Amerika.⁴ Hal ini tentunya berdampak sangat besar bagi Indonesia yang sejatinya sejak dulu merupakan negara kepulauan yang sangat bergantung pada laut.⁵ Bagi negara-negara yang penggunaan plastiknya telah melampaui kemampuan pengelolaan sampah di masing-masing negara tersebut seperti di Indonesia, terdapat kekhawatiran nyata terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat akibat pencemaran sampah plastik di laut.

Diakibatkan dari kekhawatiran terhadap naiknya volume sampah plastik di laut yang sering terjadi secara masif dan membahayakan kehidupan laut, penelitian yang dilakukan oleh *University of Georgia* di 192 negara yang memiliki garis pantai, termasuk Indonesia menyebutkan bahwa sebesar 2,5 miliar metrik ton sampah dihasilkan oleh negara-negara tersebut, dengan 275 juta metrik ton-nya (10%) adalah plastik.⁶ Sebanyak 8 juta metrik ton sampah plastik tersebut telah mencemari laut. Hal yang mengejutkan sekaligus memprihatinkan adalah Indonesia ternyata dinyatakan sebagai kontributor sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok, dengan

estimasi 0.48–1.29 juta metrik ton per tahun⁷, yang juga dibahas pada peringatan Hari Bumi pada 22 April 2018 lalu memilih tema sentral '*End Plastic Pollution*'.⁸ Di beberapa forum internasional sebelumnya, seperti *Marine Debris Summit* kedua di Virginia, *Worlds Ocean Summit* yang keempat di Bali, Konferensi Kelautan PBB New York, dan G20 Summit di Bonn, permasalahan sampah plastik di laut kini menjadi salah satu fokus bahasan penting yang didiskusikan. Melalui forum tersebut, Indonesia pun telah menyampaikan komitmen dan keseriusannya untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut pada 2025 mendatang.⁹

Fakta bahwa Indonesia mendapatkan predikat sebagai kontributor sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, tentu menjadi suatu ironi yang tajam dikarenakan Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan memiliki cita-cita menjadikan laut sebagai pusat pembangunan ekonomi, justru mengalami kendala dengan laut yang penuh sampah. Hal ini tentunya mencoreng citra Indonesia dimata pergaulan internasional dan sudah barang tentu menghambat Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Predikat memalukan tersebut sangat kontra-produktif dengan visi Indonesia untuk menjadi negara terdepan disektor maritim

⁴ Majalah Laut Kita Edisi Januari 2018. Laut Kita Masa Depan Bangsa. <http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/Majalah%20KKP/Majalah%20Laut%20Kita%20Edisi%20Januari%202018.pdf> diakses pada 8 Oktober 2018 Pukul 20.55 WIB.

⁵ Teddy Prasetyawan. 2018. *Strategi Mengatasi Sampah Plastik di Laut dalam "Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat"*. Jakarta Pusat. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hal. 13.

⁶ Media Neliti. 2016. *Statistics of Marine and Coastal Resources 2016*. [media.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F48274-ID-statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2016.pdf&usg=AOvVaw2GO-6QO7WXuadIXyGuJJK](http://media.neliti.com/media/publications/2748-274-ID-statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2016.pdf&usg=AOvVaw2GO-6QO7WXuadIXyGuJJK) diakses pada 8 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB.

⁷ Jambeck, J.R, Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T.R, Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., Law, K.L, "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean," *Science*, February 13, 2015, Volume 347, Number 6223, pp. 768–71, sciencemag.org.

⁸ Kumparan. 2018. *Peringati Hari Bumi, 192 Negara Galakan Program End Plastic Pollution*. <https://kumparan.com/redaksi-suara-mahasiswa-ui/peringati-hari-bumi-192-negara-galakan-program-end-plastic-pollution> di akses pada tanggal 06 Oktober 2018 – 17:50 WIB.

⁹ Komitmen tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut (2017-2025) disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di UN Ocean Conference di New York, 5 Juni 2017.

dengan pola produktif realisasi poros maritim dunia.

Dibeberapa konvensi internasional, Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk menurunkan 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025.¹⁰ Guna mencapai target dari komitmen tersebut, perlu distrategikan langkah-langkah penanganan sampah plastik di laut secara terukur, terintegrasi, dan terencana. Salah satunya dengan menggalakkan kerjasama dengan berbagai negara dan badan organisasi internasional. Senada dengan itulah, Indonesia bergabung dengan Badan Koordinasi Laut Asia Timur guna mengstrategikan pengurangan sampah plastik yang ada di laut Indonesia yang juga merupakan termasuk kedalam zona laut Asia Timur di dunia ini. Badan Koordinasi Laut Asia Timur atau Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA)¹¹, merupakan badan lingkungan internasional untuk melindungi dan mengembangkan lingkungan laut dan wilayah pesisir laut Asia Timur dari pencemaran laut untuk kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

COBSEA telah memetakan tujuan, sasaran, dan target regional untuk menangani permasalahan sampah di laut, sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang relevan. COBSEA dalam kerangka kerjanya akan memandu pengembangan dan implementasi kegiatan COBSEA untuk mendukung negara-negara yang berpartisipasi dalam menerapkan dan melacak pencapaian dalam kaitannya dengan SDGs terkait laut dan inisiatif regional sedang dikembangkan untuk

Rencana Aksi Regional COBSEA tentang Sampah Laut.

KERANGKA DASAR TEORI

a. Teori *Sustainable Development* (SDGs)

Dalam perkembangannya di dunia hubungan internasional pembangunan berkelanjutan mengandung dua dimensi¹², yaitu : Pertama adalah dimensi waktu karena berkelanjutan sudah pasti menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan.

Pada pertemuan tingkat tinggi di markas PBB pada September 2015, sebanyak 193 negara anggota PBB sepakat untuk menjadikan SDGs sebagai kerangka agenda pembangunan dan kebijakan politik selama 15 tahun ke depan mulai 2016 hingga 2030¹³. Pemerintah di setiap negara anggota PBB baik negara kaya, menengah, maupun miskin, baik negara maju maupun

¹⁰ BBC News. 2017. *Bagaimana Indonesia kurangi sampah plastik di laut sampai 70% pada 2025?*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40318924> diakses pada tanggal 06 Oktober 2018 – 17:54 WIB.

¹¹ Website Resmi United Nations Environment Programme : <https://www.unenvironment.org/> , diakses pada 1 April 2019 Pukul. 17.20 WIB.

¹²Adinisngsih, Sri. 2009. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Dari Aspek Ekonomi*. <http://www.perwaku.org/>, diakses pada 4 April 2019.

¹³*Sustainable Development Goals*. 2019. http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/sustainable-development-goals/ , diakses pada 4 April 2019 pukul 21.41 WIB.

berkembang memiliki tanggung jawab mengimplementasikan SDGs untuk mencapai SDGs. Negara adalah pihak yang memiliki tanggungjawab utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi, pembuatan kebijakan nasional, menentukan strategi pembangunan, yang diperlukan untuk tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan. Pemerintah semua negara diharapkan menerapkan agenda dan kebijakan politis pembangunan ekonomi nasional, untuk meningkatkan kemakmuran dan sekaligus melindungi planet bumi.

SDGs secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. Berbeda dengan MDGs¹⁴, SDGs menegaskan pentingnya strategi mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan strategi strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja), dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan. SDG terdiri atas 17 tujuan dan 169 target, yang meliputi aneka isu pembangunan berkelanjutan.

Daftar 17 tujuan dalam SDGs sebagai berikut :

¹⁴ Tujuan **Pembangunan Milenium** (*Millennium Development Goals* atau disingkat **MDGs**) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000.

1. Kemiskinan–Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat.

2. Pangan–Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan.

3. Kesehatan (Health) – Menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan / kesejahteraan bagi semua pada semua usia.

4. Pendidikan (Education) – Menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

5. Perempuan (Women) – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan gadis.

6. Air (Water) – Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua.

7. Energi (Energy) – Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern, bagi semua.

8. Ekonomi (Economy) – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bagi semua.

9. Infrastruktur (Infrastructure) – Membangun infrastruktur (prasarana) yang awet dan kuat, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung inovasi.

10. Ketidaksetaraan (Inequality) – Mengurangi ketidaksetaraan (inequality) dalam dan antar negara.

11. Pemukiman (Habitation) – Membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet/ kuat, dan berkelanjutan.

12. Konsumsi (Consumption) – Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

13. Iklim (Climate) – Mengambil langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Ekosistem Kelautan (Marine Ecosystem) – Melindungi dan

menggunakan lautan, laut, dan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

15. Ekosistem (Ecosystem) – Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi (kerusakan) tanah, dan kehilangan biodiversitas (keragaman hayati).

16. Kelembagaan (Institutions) – Menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan inklusif, pada semua level.

17. Kemitraan Keberlanjutan (Sustainability) – Memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi (menghidupkan kembali) kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan terbesar konsep tersebut saat ini adalah menciptakan keberlanjutan, termasuk didalamnya keberlanjutan sistem politik dan kelembagaan sampai pada strategi, program, dan kebijakan sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), atau dikenal sebagai Tujuan Global, adalah panggilan universal untuk bertindak untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. 17 Sasaran ini dibangun di atas keberhasilan Sasaran Pembangunan Milenium, sambil memasukkan bidang-bidang baru seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, inovasi, konsumsi berkelanjutan, perdamaian dan keadilan, di antara prioritas lainnya. Mengelaborasi 17 sasaran SDG dengan fokus permasalahan pada penelitian ini dikerucutkan lagi ke sasaran 14 yakni Life Below Water yang berhubungan dengan isu dan permasalahan mengenai ekosistem laut, SDG bertujuan

untuk mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan dari polusi, serta mengatasi dampak pengasaman laut. Meningkatkan konservasi dan penggunaan sumber daya berbasis laut secara berkelanjutan melalui hukum internasional juga akan membantu mengurangi beberapa tantangan yang dihadapi lautan salah satunya adalah sampah plastik.

b. Tingkat Analisa: Negara – Bangsa

Analisa negara bangsa berasumsi bahwa setiap pembuat keputusan, dimanapun berada, akan berperilaku yang sama jika menghadapi situasi yang sama pula. Analisa ini juga difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang Hubungan Internasional, melalui politik luar negeri suatu negara. Dengan demikian, analisa ini menekankan pada perilaku negara bangsa karena Hubungan Internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku kedua objek ini.¹⁵¹⁶

Tingkat analisa negara bangsa menekankan bahwa setiap tindakan yang terjadi di dunia yang diakibatkan oleh suatu keputusan pada akhirnya akan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengatasnamakan negara atau dengan kata lain negara merupakan satu-satunya subjek Internasional. Situasi yang dihadapi negara lain menjadi salah satu dasar tindakan bagi suatu negara untuk dapat bertahan hidup ataupun dalam upaya meningkatkan interaksi dengan negara lain.¹⁷

c. Konsep Keamanan Maritim

¹⁵Singer, J.D. 1961. *World Politics: The Level of Analysis Problem in International Relations. Theoretical Essay: Volume 14, No. 1*, hal. 82 – 87.

¹⁶Mohctar, Mas'oeed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal. 41.

¹⁷Miriam, Budiardjo. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Hal. 91.

Konsep keamanan maritim dahulunya jarang digunakan, sekalinya digunakan hanya menjadi referensi untuk pengendalian laut atas wilayah maritim dalam konteks konfrontasi kekuatan super. Selama Perang Dingin, keamanan maritim lebih sering digunakan sebagai referensi untuk pertimbangan geopolitik dalam kegiatan klaim kedaulatan atas wilayah maritim, status perairan pesisir, dan kendali atas zona maritim. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep keamanan maritim semakin digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir kegiatan ilegal di laut atau dari laut, yang termasuk sengketa antar negara terhadap batas maritim; terorisme maritim; pembajakan kapal; perdagangan narkoba, orang dan barang terlarang lainnya; penangkapan ikan ilegal; serta pengerusakan terhadap lingkungan.¹⁸

Inti dari konsep keamanan maritim adalah pertahanan atau perlindungan terhadap negara yang menjelaskan dan mengatur peran dan strategi tiap stakeholder dan kementerian atau lembaga yang terkait dengan kemaritiman. Hal ini tentu berkesinambungan mengenai permasalahan sampah di laut dikategorikan sebagai polutan yang dapat mengancam keamanan manusia pada gambar menurut Beuger. Struktur ini akan menghasilkan 2 hal, dimana suatu negara akan berusaha untuk mendominasi yang lainnya; serta suatu negara akan berusaha untuk meningkatkan keamanannya, namun bukan hanya meningkatkan kekuatan militer saja, namun juga intensitas diplomasi dan kerjasama.

Situasi seperti inilah yang dirasa bahwa keamanan maritim terlebih keamanan manusia Indonesia yang telah terancam dengan berkembangnya isu negatif yang menempatkan Indonesia sebagai dalang utama permasalahan

kompleks mengenai sampah plastik di laut. Hal ini merupakan ancaman bagi kedaulatan Indonesia dan masyarakatnya dan telah dilakukan strategi sekuritisasi, terutama pada domain maritim. Kedaulatan, dan potensi sumber daya maritim Indonesia merupakan nilai yang sangat penting diperjuangkan oleh suatu negara dalam usahanya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia perlu meningkatkan kebijakan luar negerinya dengan cara meningkatkan dan mengumpulkan kekuatan, dengan cara diplomasi maritim dan kerjasama pada fokus pengurangan sampah plastik di laut dengan negara lain. Mengingat kategori intensitas manajemen laut Indonesia masih berada pada fase membangun kekuatan bersama dengan komponen yang ada di pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN GAMBARAN UMUM COORDINATING BODY ON THE SEAS OF EAST ASIA (COBSEA)¹⁹

Wilayah Laut Asia Timur mencakup wilayah terpadat di dunia. Wilayah Laut Asia Timur adalah rumah bagi hampir 2 miliar orang, 60 persen diantaranya terfokus di daerah pesisir. Dalam dekade terakhir ini, wilayah Asia Timur telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang besar dan signifikan yang membawa peningkatan urbanisasi cukup tinggi. Sekitar 300 juta orang di wilayah ini sekarang tinggal di daerah perkotaan pesisir.

Pada tahun 1977, *United Nations Environment Programme* (UNEP) mendukung sepenuhnya pembentukan program laut regional di Asia Timur. Program Kerja Regional Kelautan oleh UNEP pertama kali diluncurkan pada 1974

¹⁸Germond, Basil. 2014. *The Geopolitical Dimension of Maritime Security*. United Kingdom: University of Lancaster (Marine Policy Journal), hal. 137 - 138

¹⁹Data olahan penulis. Sumber : About COBSEA. 2018. <https://www.cobsea.org/aboutcobsea/background.html>, diakses pada 1 April 2019 Pukul.17.24 WIB.

bertepatan setelah Konferensi PBB tahun 1972 tentang Lingkungan Manusia yang diadakan di Stockholm. Program kerja ini bertujuan untuk mengatasi percepatan degradasi lautan dan wilayah pesisir dunia melalui pengelolaan berkelanjutan dengan melibatkan negara-negara tetangga untuk melindungi lingkungan hidup kelautan secara bersama. Pada awalnya, lima Negara di Asia Timur yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah mengakui bahwa langkah-langkah nyata dan sistematis sangat diperlukan untuk merumuskan dan membangun program ilmiah yang melibatkan penelitian, pencegahan dan pengendalian pencemaran laut. Reaksi yang di hasilkan dari aksi tersebut, membuat Dewan Pimpinan United Nations Environment Programme (UNEP) mendukung pembentukan program kerja laut regional untuk Asia Timur di Indonesia pada tahun 1977, dengan badan organisasinya disebut Badan Koordinasi Laut Asia Timur atau Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA).

Pada tahun 1983 Dewan Pimpinan United Nations Environment Programme (UNEP) dan COBSEA resmi mengeluarkan Rencana Aksi Regional yang pertama mengenai Perlindungan dan Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Laut dan Pesisir di Kawasan Asia Timur.

Lalu pada tahun 1994, keanggotaan COBSEA bertambah dengan bergabungnya Australia, Kamboja, Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam. Badan Koordinasi Laut Asia Timur didirikan untuk bekerjasama dengan organisasi kawasan yang non-pemerintah dan organisasi dibawah pemerintah serta program regional yang ada untuk meningkatkan koordinasi antara pihak yang bekerja pada lingkungan pesisir dan laut. Program Regional Laut Asia Timur telah mengarahkan kepada pembahasan yang unik. Rencana Aksi Regional Laut Asia Timur dipimpin oleh Badan Koordinasi Laut Asia Timur (COBSEA) yang terdiri dari sepuluh negara anggota.

Sekretariat COBSEA sebenarnya adalah badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masalah lingkungan laut di Asia Timur, yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan pemerintah, LSM, PBB dan lembaga donor, dan individu dalam merawat lingkungan laut kawasan Asia Timur.

Sebagai tindak lanjut dari Rencana aksi tahun 1983 maka COBSEA kembali mengeluarkan Rencana Aksi yang sama namun lebih disempurnakan. Sebagai bagian dari kegiatan persiapan untuk perumusan rencana aksi regional lanjutan, sejumlah besar survei, tinjauan, studi dan pertemuan disiapkan dan diselenggarakan atas inisiatif UNEP, badan-badan PBB lainnya dan Negara-negara kawasan. Pada awal 1979, sebuah misi eksplorasi menilai kelayakan rencana aksi untuk Asia Timur dan rancangan pertama rencana tersebut disiapkan oleh UNEP.

Rancangan rencana aksi ditinjau dan disempurnakan oleh dua pertemuan para ahli yang ditunjuk oleh Negara-negara kawasan (Baguio, Juni 1980 dan Bangkok, Desember 1980).

Keputusan untuk merevisi Rencana Aksi Laut Asia Timur yang baru muncul pada pertemuan ke 10 Badan Koordinasi Laut Asia (COBSEA) yang diadakan di Bangkok, Thailand pada 9-10 Juli 1993. Langkah semacam itu harus dilakukan sejalan dengan revisi Strategi Jangka Panjang COBSEA yang harus mempertimbangkan Bab 17 Agenda 21, dan semua perkembangan nasional dan regional terkini mengenai Laut Asia Timur. Dua faktor utama yang memandu revisi semacam itu adalah perluasan COBSEA untuk memasukkan wilayah Laut Asia Timur yang lebih luas, dan perlunya Strategi Jangka Panjang untuk menjadi "berorientasi masalah dan digerakkan oleh manajemen" dan terintegrasi dalam pendekatan, dengan tujuan akhir dari peningkatan aktual dan nyata dalam kualitas lingkungan pesisir dan laut.

Diperkirakan bahwa partisipasi untuk COBSEA akan diperluas untuk mencakup semua negara yang berbatasan dengan Laut Asia Timur. Mengingat hal ini, negara-negara yang pada awalnya tidak berpartisipasi dalam COBSEA telah menghadiri pertemuan COBSEA antar pemerintah yang lebih baru sebagai pengamat.

Pada tahun 1996, dikembangkan UNEP Project berjudul "Tren Pengembalian Lingkungan di Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand". Proyek ini diprakarsai untuk mengatasi masalah lingkungan dari lingkungan laut di Laut Tiongkok Selatan dan Teluk Thailand dan mencakup tujuh dari sepuluh negara anggota COBSEA, yaitu Kamboja, Tiongkok, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Ringkasan proyek disahkan pada Pertemuan ke-15 COBSEA pada tahun 2000 dan proyek tersebut mulai beroperasi pada tahun 2002. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk menciptakan lingkungan, di tingkat regional, di mana kolaborasi dan kemitraan (antara semua pemangku kepentingan dan pada semua tingkat) dalam menangani masalah lingkungan di Laut Tiongkok Selatan dipupuk dan didorong dan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah yang berpartisipasi untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pembangunan nasional perencanaan.

Pada tahun 2000 COBSEA mendukung Program Aksi Regional untuk Perlindungan Lingkungan Laut dari Laut Asia Timur dari Efek Kegiatan Berbasis Lahan.

Pada Pertemuan ke-16 COBSEA pada tahun 2001 dan selanjutnya merupakan akibatnya pada Pertemuan ke-17 pada tahun 2004, negara-negara anggota COBSEA diberi tahu bahwa dukungan keuangan dari UNEP Environment Fund akan berkurang. Di semua Program Laut Regional, dukungan untuk sekretariat berasal dari negara-negara anggota.

Ancaman lingkungan yang muncul menimbulkan tantangan baru bagi negara-negara anggota COBSEA, seperti permasalahan sampah plastik menjadi fokus yang baru mengenai arah strategis COBSEA (akan dibahas di subbab 2.3). Dalam banyak kasus ada penelitian terbatas dan pemahaman tentang dampak dari isu-isu strategis dan yang muncul seperti pada lingkungan pesisir dan laut di wilayah Laut Asia Timur. Sementara banyak program dan proyek yang telah dikembangkan di kawasan Asia Timur Laut dimulai sebagai teknis / tanggapan ilmiah untuk masalah lingkungan tertentu, beberapa telah berkembang menjadi kebijakan tingkat struktur antar pemerintah yang harus diperhitungkan ketika mengembangkan sebuah arah baru strategis untuk COBSEA.

KEADAAN OBJEKTIF WILAYAH ASIA TIMUR DAN INDONESIA MENGENAI PERMASALAHAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT

Situasi sampah plastik di laut di Laut Asia Timur kemungkinan akan separah ini, jika tidak lebih buruk daripada bagian dunia mana pun. Pengembangan industri dan perkotaan besar-besaran sedang berlangsung di zona pesisir di wilayah ini, dikombinasikan dengan pertumbuhan eksponensial dan berkelanjutan dalam kegiatan pengiriman yang melayani ekonomi Asia Timur yang berkembang pesat, dan kurangnya tindakan pencegahan dan pengendalian sampah plastik di laut yang efektif saat ini di banyak negara Asia Timur, membuat sampah plastik di laut menjadi polusi dan permasalahan utama di wilayah Laut Timur Asia.

Para ahli melaporkan bahwa sampah plastik di laut yang ditemukan terakumulasi di banyak garis pantai di Laut Asia Timur berasal dari sumber yang jauh, seringkali bahkan melintasi sisi lain samudera luas. Dalam mengembangkan tindakan dan langkah-langkah untuk mengatasi sampah plastik di laut, penting

bagi para ilmuwan, regulator dan industri untuk memiliki pemahaman tentang pola sirkulasi laut.

Perkembangan tentang isu sampah plastik di laut Indonesia telah memasuki babak baru. Pemerintah Indonesia terkejut sejak penelitian Jenna Jambeck, peneliti dari Universitas Georgia, Amerika merilis hasil penelitiannya²⁰: Pertama bahwa Indonesia merupakan negara kedua terbesar penyumbang sampah sebesar 3.2 juta ton. Kita hanya kalah dari negara Tiongkok di peringkat pertama. Kedua bahwa dari 192 negara pesisir (termasuk Indonesia), setidaknya sudah membuang sampah ke laut sebesar 12.7 juta ton. Dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dari India, negara tersebut masih jauh dibawah Indonesia dalam menyumbang sampah ke laut. Ketiga adalah prediksi kenaikan jumlah sampah yang masuk ke laut akan berlangsung secara eksponensial jika infrastruktur di darat tidak diperbaiki.

Di tingkat global, Tiongkok merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Kontribusi negeri tirai bambu mencapai 8,82 juta ton. Disusul Filipina (1,88 juta ton), Vietnam (1,83 juta ton), Sri Lanka (1,59 juta ton), Thailand (1,03 juta ton), Mesir (0,97 juta ton), dan Malaysia (0,94 juta ton). Jambeck, dkk (2015) mencatat, Indonesia menyumbang sampah plastik sebesar 3,32 juta ton atau berada di posisi kedua setelah Tiongkok.²¹

Sampah di laut Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor. Secara jelas, bahwa faktor pertama adalah konstelasi sebaran penduduk yang sebagian besar berada pada tepian sungai

dan laut. Hal ini juga diperparah dengan paradigma masyarakat : “laut dianggap masih dapat mengelola sampah”. Kemudian, industri masih menganggap bahwa plastik adalah bahan yang murah, mudah dibuat, dan tahan lama. Perubahan proses produksi dianggap tidak akan mampu mengembalikan modal dalam jangka pendek.

Jika dilihat dari sirkulasi arus di perairan Indonesia, jumlah sungai, dan sebaran penduduk, maka laut Jawa dapat dikatakan sebagai lumbung sampah, walaupun kajian ini masih bersifat parsial. Arus laut Jawa yang disebut sebagai “giant river” mengindikasikan bahwa perairan ini hanya mengalir dari timur ke barat dan sebaliknya. Di sebagian lokasi bahkan tidak mempunyai hulu dan hilir. Kemudian, adalah wilayah selat Malaka dengan padatnya jalur pelayaran dan perbatasan dengan negara lain. Wilayah lain yang penting untuk dikaji adalah selat Makassar bagian bawah yang berdekatan dengan Masalembu hingga Bali dan NTT.

STRATEGI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA KERJASAMA REGIONAL COORDINATING BODY IN THE SEAS OF EAST ASIA (COBSEA) UNTUK MENGURANGI SAMPAH PLASTIK DI LAUT

Inisiatif program kerja mengenai sampah plastik di Laut Asia Timur dimulai oleh *Coordinating on the Seas of East Asia* (COBSEA) pada tahun 2005 sebagai bagian dari *Program Global United Nations Environment Programme* (UNEP) tentang Sampah plastik di laut. Inisiatif mengenaistrategi pengurangan sampah plastik di Laut Asia Timur ini mencakup kegiatan tinjauan status dan dampak masalah sampah plastik di laut dan langkah-langkah pengelolaan yang ada di wilayah Laut Asia Timur dan juga pengembangan dokumen kerangka kerja tentang Rencana Aksi Regional untuk Pengelolaan Sampah plastik di laut yang berkelanjutan yang biasa disebut *Regional*

²⁰ Media Neliti. 2016. *Statistics of Marine and Coastal Resources* 2016. media.neliti.com/media/publications/2F48274-ID-statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2016.pdf&usg=AOvVaw2GO-6QO7WXuardIXyGuJJK diakses pada 8 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB.

²¹ Jenna R. Jambeck, dkk.2015. *SCIENCE*, Vol. 347, Isu 6223. Hlm.769.

Action Plan of Marine Litter (RAP-MALI).

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari RAP-MALI itu perlu untuk COBSEA dan negara-negara yang berpartisipasi untuk melaksanakan strategi dan kegiatan yang jelas dan terstruktur. RAP-MALI memiliki rencana kerja yang rinci yang meliputi setiap tindakan dan aktivitas, timeline, tanggung jawab dan anggaran yang telah diperkirakan. Kekurangan dalam implementasi dan penegakan peraturan dan standar internasional, regional, nasional yang ada dapat memperbaiki situasi, dikombinasikan dengan kurangnya kesadaran di antara para pemangku kepentingan utama dan masyarakat umum, adalah alasan utama lainnya mengapa masalah sampah plastik di laut tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi telah meningkat menjadi permasalahan yang universal di seluruh dunia.

Perlu dicatat bahwa dalam mengembangkan strategi dalam RAP-MALI, para peserta dalam COBSEA sepakat bahwa, selalu mengingat wilayah tersebut baru saja memulai menangani masalah sampah plastik di laut, pada awalnya perlu memfokuskan hanya pada prioritas strategi, tindakan dan kegiatan dasar, yang akan meletakkan dasar untuk pengembangan lebih lanjut dari tindakan pencegahan dan tanggapan sampah plastik di laut yang lebih canggih di masa depan.

Sejalan dengan tujuan RAP-MALI, strategi-strategi yang dikembangkan Indonesia berdasarkan kerjasama regional dengan COBSEA untuk mengurangi sampah plastik di laut adalah sebagai berikut:

Mencegah dan Mengurangi Sampah Plastik di Laut dari Sumber yang Berbasis Daratan

Mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari komponen sumber

berbasis darat sangat penting karena sekitar 80% sampah plastik di laut berasal dari darat. Poin utama dari komponen ini adalah mengurangi produksi sampah plastik di laut dan memasukkan sampah plastik di laut ke dalam pengelolaan sampah plastik di laut terpadu. Dalam bekerja untuk mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber-sumber berbasis darat, COBSEA akan berusaha untuk bekerja sama dengan UNEP termasuk pendanaan bersama atau implementasi proyek-proyek yang sesuai.

Mencegah dan Mengurangi Sampah Plastik di Laut dari Sumber yang Berbasis Aktivitas Laut

Kegiatan untuk mengurangi dan mencegah sampah plastik di laut dari sumber-sumber berbasis laut harus memastikan penyediaan fasilitas penerimaan yang memadai untuk semua jenis sampah plastik di laut dan sisa muatan yang dihasilkan oleh kapal, khususnya sampah plastik di laut padat dan sampah, di pelabuhan, pelabuhan penangkapan ikan, pelabuhan dan resor pantai.

Mengurangi Dampak dan Akibat Sampah Plastik di Laut

Mengakui bahwa upaya untuk mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari semua sumber seperti yang biasanya dilakukan tanpa adanya kerangka kerja yang jelas tidak akan sepenuhnya efektif, dan mengingat kondisi parah saat ini dan meningkatnya keparahan sampah plastik di Laut Asia Timur, tindakan dan kegiatan juga diperlukan untuk mengurangi sampah yang melakukan dan akan terus memasuki lingkungan laut dan pesisir di wilayah tersebut. Sebagai titik awal, di bawah RAP-MALI langkah mitigasi utama yang diusulkan adalah pembersihan dan pembersihan sampah plastik di laut laut.

Meningkatkan Kesadaran terhadap Sampah di Laut

Tinjauan Regional Sampah plastik di laut di wilayah Laut Asia Timur mengidentifikasi kurangnya kesadaran yang parah tentang masalah sampah plastik di laut di antara semua tingkatan dan sektor masyarakat di Asia Timur, sebagai mungkin satu-satunya penghalang terbesar untuk menangani masalah di wilayah ini. Oleh karena itu dianggap logis dan bijaksana bahwa pengembangan dan implementasi kampanye komunikasi dan kesadaran bersama harus membentuk salah satu tindakan prioritas tinggi, awal, dasar dari RAP-MALI.

Manajemen Informasi Searah Terhadap Sampah Plastik di Laut

Sistem informasi sampah plastik di laut laut regional: Pertimbangkan manfaat membangun sistem informasi regional pusat tentang sampah plastik di laut laut di Sekretariat COBSEA dan peran yang diketahui oleh Knowledgebase Laut Asia Timur dan basis data lain yang ada, seperti database sampah plastik di laut laut yang dikelola oleh NOWPAP Pusat Kegiatan Regional Jaringan Data dan Informasi (DINRAC), dapat diputar.

Jika dikembangkan, sistem informasi seperti itu dapat digunakan untuk penyimpanan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi hasil survei sampah plastik di laut laut nasional dan program pemantauan, serta pengembalian data dari acara ICC di wilayah tersebut dan sumber laut terkait lainnya. informasi sampah di wilayah tersebut.

Sistem informasi seperti itu dapat menyajikan output secara grafis pada GIS berbasis petamenyediakan representasi visual dari penyebaran geografis masalah. Ini akan menyediakan alat pemantauan yang kuat untuk menilai tingkat regional sebenarnya dari masalah, termasuk hot spot regional, serta tren dari waktu ke waktu dan keefektifan atau sebaliknya dari respons manajemen dan kontrol.

Referensi:

Jurnal:

Jambeck, J.R, Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T.R, Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., Law, K.L, "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean," Science, February 13, 2015, Volume 347, Number 6223, sciencemag.org.

KEMENKO MARITIM. 2017. *Laporan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2017*. Jakarta: Coordinating Ministry For Maritime Affairs Republic Of Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. *KKP Komitmen Tangani Dampak Sampah Plastik di Wilayah Pesisir dan Laut*. Jakarta Pusat.

National Oceanic and Atmospheric Administration. 2008. *Interagency Report on Marine Debris Sources, Impacts, Strategies & Recommendations*. Silver Spring, MD.

Teddy Prasetiawan. 2018. *Upaya Mengatasi Sampah Plastik di Laut dalam "Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat"*. Jakarta Pusat. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Buku:

Clark, R.B., 1986. *Marine Pollution*, Oxford University Press, Oxford. hlm. 84.

Coordinating Body On The Seas Of East Asia. 2018. *Marine Litter in the East Asia Seas Region*.

Haryanto, Agus dan Isman Pasha. 2016. *Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Hetherington, Jane et. al., 2005. *The Marine Debris Research, Prevention and Reduction Act: A Policy Analysis*, Columbia University, New York. hlm. 18-19.

Jeftic, Ljubomir, etc. 2009. *United Nations Environment Programme. Marine Litter: a Global Challenge.*

Media Lainnya:

Dokumen Resmi:

Konferensi Rio+20

UNEP Action Plan 1983

UNEP Action Plan 1994

10th Meeting of The Coordinating Body on The Seas of East Asia (COBSEA)

12th Meeting of The Coordinating Body on The Seas of East Asia (COBSEA)

15th Meeting of The Coordinating Body on The Seas of East Asia (COBSEA)

16th Meeting of The Coordinating Body on The Seas of East Asia (COBSEA)

17th Meeting of The Coordinating Body on The Seas of East Asia (COBSEA)

New Strategic Direction for COBSEA 2008-2012

18th Meeting of The Coordinating Body on The Seas of East Asia (COBSEA)

1st Coordinating Body on The Seas of East Asia (COBSEA) Marine Litter Workshop

19th Meeting of The Coordinating Body on The Seas of East Asia (COBSEA)

National Action Plan Marine Plastic Debris Indonesia Summary

Situs Web:

Alexander Parkles.
<http://www.historyofplastic.com/plastic-inventor/alexander-parkes/>, diakses pada 7 April pukul 23.28 WIB.

Association of South East Asian Nations :
<https://asean.org/asean/external-relations/east-asia-summit-eas/>, diakses pada 5 April 2019 pukul 22.00 WIB.

BBC News. 2017. *Bagaimana Indonesia kurangi sampah plastik di laut sampai 70% pada 2025?*.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40318924> diakses pada tanggal 06 Oktober 2018 – 17:54 WIB

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 2015. *Potensi Energi Laut Indonesia Besar.* <http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/06/19/880/potensi.energi.laut.indonesia.besar>, diakses pada 6 April 2019 pukul 21.28 WIB.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 2009. *Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).* <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/33-beranda/2646-rencana-aksi-nasional-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-ran-grk.html>, diakses pada 6 April 2019.

Dinarto, Dedi Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia di Era Presiden Joko Widodo. pdf <https://www.researchgate.net/publication/309726899> diakses pada 22 Maret 2019

Natasasmita, Dias. 2016. *Konsep dan Pemahaman Indonesia sebagai Negara Maritim dan Ranah Kelautan.* https://www.kompasiana.com/diveradios/konsep-dan-pemahaman-indonesia-sebagai-negara-maritim-dan-ranah-kelautan_5819478f727a61ee0d7ad570, diakses pada 4 Maret 2018 – 20:17 WIB.

Maritimnews. 2017. *Diplomasi maritime untuk kedaulatan Indonesia.* <http://maritimnews.com/2017/05/diplomasi-maritim-untuk-kedaulatan-indonesia/> diakses pada tanggal 08 Oktober 2018 – 15:00 WIB.

Kenneth <https://www.bsu.edu/academics/collegesanddepartments/history/about/faculty-staff/faculty/hallkenneth>, diakses

- pada 6 April 2019 pukul 13.04 WIB.
- Kumparan. 2018. *Peringati Hari Bumi, 192 Negara Galakan Program End Plastic Pollution*. <https://kumparan.com/redaksi-suara-mahasiswa-ui/peringati-hari-bumi-192-negara-galakan-program-end-plastic-pollution> di akses pada tanggal 06 Oktober 2018 – 17:50 WIB.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. 2017. Peluang Indonesia sebagai Poros Maitim Dunia. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Tantangan-dan-Peluang-Indonesia-sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx> , diakses pada 5 April 2019 pukul. 22.58 WIB.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2014. Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx>, diakses pada 6 April 2019 pukul 21.46 WIB.
- Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia <https://maritim.go.id>, diakses pada 11 April 2019 pukul 18.00 WIB.
- Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. 2017. *Isu dan Tema Permasalahan Kelautan*. <http://www.maritim.go.id/> ., diakses pada 11 April 2019 pukul 18.15 WIB.
- Letkol (Purn) TNI AL Djuanda Wijaya, *Membangun Kembali Kejayaan Negara Maritim Nusantara*, The Global Review. http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=17577&type=8, diakses pada 6 April 2019 pukul 13.15 WIB.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2017. Inilah Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia. <http://lipi.go.id/berita/inilah-tantangan-pengelolaan-sumber-daya-maritim-indonesia/17660>, diakses pada 6 April pukul 21.24 WIB.
- Lingkungan Hidup. 2016. Masalah Sampah Plastik di Indonesia dan Dunia. <https://lingkunganhidup.co/sampah-plastik-indonesia-dunia/>, diakses pada 6 April 2019 pukul 21.35 WIB.
- Ocean Data View. 2017. Ocean Atlas. <https://odv.awi.de/data/ocean/world-ocean-atlas/>, diakses pada 6 April 2019 pukul 13.30 WIB
- Pramudianto , Andreas. 2014. Diplomasi Lingkungan Hidup. <https://staff.blog.ui.ac.id/andreas-pramudianto/2009/07/29/diplomasi-lingkungan-hidup/>, diakses pada 11 April 2019 pukul 15.15 WIB.
- Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS. 2015. Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim. www.researchgate.net/profile/Tri-doyo_Kusumastanto/... Arah_Strategi_P. (diakses pada 5 April 2019 pukul. 00.43 WIB)
- Hukum , Iskar. Vania Zulfa, Milson Max, dan Irfan Ilyas.2016. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan : Isu-Isu Kritis Lingkungan Dan Perspektif Global (Vol.5 No.1 Juli 2016)* <https://media.neliti.com/media/publications/201881-isu-isu-kritis-lingkungan-dan-perspektif.pdf>, diakses pada 11 April 2019 pukul 15.31 WIB.
- Triadmojo, Marsudi. UNEP dan Perkembangan Hukum Lingkungan Regional di Kawasan Asia Tenggara. i-

- lib.ugm.ac.id, diakses pada 11 April 2019 pukul 15.24 WIB.
- Global Environment Facility. <https://www.thegef.org/topics/large-marine-ecosystems>, diakses pada 11 April 2019 pukul 16.30 WIB.
- MetroTv <http://foto.metrotvnews.com/view/2017/03/03/666429/infografik-5-pilar-poros-maritim>, diakses pada 11 April 2019 pukul 18.15 WIB.
- Media Neliti. 2016. Statistics of Marine and Coastal Resources 2016. [media.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F48274-ID-statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2016.pdf&usg=AOvVaw2GO-6QO7WXuardIXyGuJJK](http://media.neliti.com/media/publications/2F48274-ID-statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2016.pdf&usg=AOvVaw2GO-6QO7WXuardIXyGuJJK) diakses pada 8 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB.
- United Nations Environment Programme (2005). *Marine Litter, an analytical overview*. http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/analytical_overview.pdf, diakses pada 12 april 2019.
- UNESCO's World Heritage Sites : <https://whc.unesco.org/en/list/>, diakses pada 6 April 2019 pukul 13.00 WIB
- UNESCO (UNESDOC Database). 2017. Global Science Report. <https://unesdoc.unesco.org/>., diakses pada 17 April 2019.
- World Ocean Review, 2010. *Living with The Oceans. – A Report on The State Of The World's Oceans*. <http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8734>, diakses pada 12 April 2019.
- World Resources Institute (2009). *Water Quality Trading Programs: An International Overview, Issue Brief no. 1*, [http://pdf.wri.org/water_trading_q](http://pdf.wri.org/water_trading_quality_programs_international_overview.pdf)
- [uality_programs_international_overview.pdf](http://pdf.wri.org/water_trading_quality_programs_international_overview.pdf).
- National Oceanic and Atmospheric Administration (2015). Marine Debris Program. 2015 Report on the impacts of “ghost fishing” via derelict fishing gear. Silver Spring, MD. http://marinedebris.noaa.gov/sites/default/files/publications-files/Ghostfishing_DFG, diakses pada 12 April 2019.
- S.B., Sheavly. 2005. “Marine Debris - An Overview Of Critical Issue For Our Oceans.” *Sixth Meeting of the UN Open-Ended Informal Consultative Processes on Oceans & the Law of the Sea*, http://www.un.org/Depts/los/consultative_process/consultative_process.htm diakses pada tanggal 14 April 2019.
- The Future We Want: Outcome Document Adopted at Rio+20*," <http://www.un.org/en/sustainablefuture/>, diakses pada 26 Maret 2019.